

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konservatisme adalah prinsip dalam laporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi dengan ketidakpastian. Akuntansi yang konservatif berarti bahwa seorang Akuntan bersikap pesimis dalam menghadapi ketidakpastian laba atau rugi dengan memilih prinsip atau kebijakan yang memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan biaya, merendahkan penilaian aktiva dan meninggikan penilaian utang (Pahlepi, 2013). Konservatisme dalam akuntansi secara tradisional didefinisikan sebagaiantisipasi terhadap semua rugi tetapi tidak mengantisipasi laba (Deviyanti, 2012). Pengantisipasi rugi berarti pengakuan rugi sebelum suatu verifikasi hukum dapat dilakukan dan hal yang sebaliknya dilakukan terhadap laba.

Tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan oleh setiap perusahaan berbeda-beda, hal itu bisa disebabkan karena adanya berbagai alternatif pilihan metode akuntansi dan dapat pula disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi masing-masing perusahaan. Dalam perkembangannya, penggunaan prinsip konservatisme akuntansi menunjukkan peningkatan. Banyak perusahaan yang menggunakan prinsip tersebut untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak stabil.

Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan globalisasi menuntut adanya suatu standar akuntansi internasional yang dapat diterima dan dapat dipahami secara internasional yaitu IFRS (*International Financial Reporting Standard*) yang kemudian dijadikan sebagai pedoman penyajian laporan keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia (Juanda, 2012). Dengan adanya implementasi PSAK berbasis IFRS di Indonesia, pengukuran atau penilaian baik aset maupun liabilitas akan menyediakan opsi penilaian dengan *fair value* atau

nilai wajar. Sebagian besar pengukuran atau penilaian yang disarankan pada IFRS adalah menilai aset dan liabilitas dengan menggunakan nilai wajar. Dengan demikian, prinsip konservatisme yang sebelumnya berlaku dalam SAK yang sebagian masih mengacu pada US GAAP seakan-akan berkurang tingkat penerapannya atau dapat dikatakan prinsip konservatisme dihilangkan dan digantikan dengan prinsip yang bernama *prudence* (Yustina, 2013). Setelah implementasi PSAK berbasis IFRS di Indonesia, ada yang menganggap bahwa prinsip ini telah hilang dan ada juga yang menganggap bahwa konservatisme masih ada bahkan meningkat levelnya dalam laporan keuangan setelah adanya implementasi PSAK berbasis IFRS. Hasil penelitian Balsari, *et al.* (2010) menyimpulkan bahwa konservatisme justru meningkat setelah adanya konvergensi IFRS di Turki. Di Indonesia penelitian sejenis dilakukan oleh Wardhani (2008) yang membuktikan bahwa konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap kualitas laba yang diukur dengan konservatisme akuntansi.

Di Indonesia penerapan atau implementasi IFRS semakin meningkat yang diwujudkan dengan disahkannya PSAK berbasis IFRS. Pada awal konvergensi IFRS tahun 2012 diketahui bahwa DSAK IAI telah mengadopsi dan mengesahkan 40 PSAK, 20 ISAK dan 11 PPSAK. Ditahun 2013-2014 DSAK IAI telah mengesahkan (standar baru termasuk penyesuaian) sebanyak 13 PSAK dan 4 ISAK serta penyesuaian tahunan, selama tahun 2015 DSAK IAI sudah mengesahkan 11 PSAK dan 2 ISAK serta penyesuaian tahunan dan selama tahun 2016 DSAK IAI sudah mengesahkan KKPK dan 7 PSAK (termasuk standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan). Dan yang terbaru DSAK IAI selama tahun 2017 sudah mengesahkan 3 PSAK, 2 ISAK, 5 Amandemen dan 2 PPSAK.

Tidak adanya kata konservatisme yang tercantum dalam konseptual IFRS bukan berarti bahwa prinsip konservatisme tidak lagi diterapkan. Meskipun ada yang beranggapan bahwa prinsip konservatisme telah hilang tetapi pada kenyataannya prinsip konservatisme masih ada bahkan meningkat levelnya dalam laporan keuangan setelah SAK mengadopsi IFRS. Penelitian yang mendukung pernyataan tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Yustina (2013) yang disimpulkan bahwa Konvergensi IFRS tidak berpengaruh signifikan dengan arah

koefisien negatif terhadap tingkat konservatisme akuntansi, hal itu berarti prinsip konservatisme akuntansi masih ada dan diterapkan pada pelaporan keuangan untuk tahun penelitian 2009-2011.

Meskipun IFRS diciptakan dengan harapan laporan keuangan dapat menjadi relevan dan andal, namun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan tetap harus berhadapan dengan “ketidakpastian” yang menjadi alasan diterapkannya prinsip konservatisme ditengah era IFRS (Juanda, 2012). Selain itu, konservatisme merupakan bagian dari budaya akuntan diseluruh dunia saat ini, dan ketika IFRS diterapkan oleh akuntan, konservatisme mungkin memainkan peran yang lebih besar daripada yang diduga oleh pembuat standar.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi manajemen melakukan tindakan konservatisme akuntansi diantaranya adalah *Bonus Plan*. *Bonus plan* berkaitan erat dengan stuktur kepemilikan manajerial dimana para manajer dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Dapat disimpulkan manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai laba yang meningkatkan laba periode berjalan.

Faktor lain yang mempengaruhi konservatisme adalah *political cost*. *Political cost* menyatakan bahwa konflik kepentingan antara perusahaan (manajer) dengan pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengalihkan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku akan menimbulkan biaya politik (Sulastiningsih dan Husna, 2017). Makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Selain itu terdapat *debt covenant* yang mempengaruhi konservatisme akuntansi dimana *debt covenant* adalah kontrak hutang yang ditunjukkan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjam dan *recovery* pinjaman (Fahturahmi, dkk, 2015). Dalam hal ini makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur

akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investor. Hal itu merupakan suatu bagian dari implementasi *good corporate governance* (Limantauw, 2012). Isu *corporate governance* dilatarbelakangi adanya konflik keagenan. Pandangan teori agensi dimana terdapat pemisahan antara pihak agen dan prinsipal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Keterlibatan mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian teori agensi memberikan gambaran bahwa konservatisme akuntansi berperan dalam laporan keuangan dan merupakan salah satu mekanisme akuntansi yang berperan dalam tata kelola perusahaan (Yustina, 2013). Seperti yang disampaikan oleh Lafond dan Watts (2006) dalam Yustina (2013) bahwa peranan konservatisme akuntansi adalah dapat mengurangi kemampuan manajer untuk melakukan manipulasi dan *overstatement* terhadap laporan keuangan, terutama mengenai kinerja keuangan sehingga dapat meningkatkan arus kas dan nilai perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *bonus plan* terhadap konservatisme akuntansi dilakukan oleh Aisha (2016), Sulastiningsih dan Husna (2017) dan Vemiliyarni (2014) dengan hasil tidak berpengaruh signifikan sedangkan Iskandar (2016) dengan hasil berpengaruh signifikan. Untuk pengaruh *political cost* terhadap konservatisme akuntansi dilakukan oleh Sulastiningsih dan Husna (2017) dengan hasil berpengaruh tidak signifikan serta sedangkan oleh Vemiliyarni (2014), Iskandar (2016) dan Aisha (2016) dengan hasil berpengaruh signifikan. Penelitian mengenai pengaruh *debt covenant* terhadap konservatisme akuntansi dilakukan oleh Vemiliyarni (2014), Iskandar (2016), Aisha (2016) dan Sulastiningsih dan Husna (2017) dengan hasil tidak signifikan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2017) memberikan bukti signifikan.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh proporsi komisaris independen dan ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi dilakukan oleh

Wardani (2008) dan Yustina (2013) dengan hasil proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Penelitian lain dilakukan oleh Bara (2016) dengan hasil proporsi komisaris independen dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aisha (2016) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada perbedaan tahun pengamatan, pada penelitian Aisha (2016) menggunakan tahun pengamatan 2012-2014 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun pengamatan 2014-2016. Selain itu perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel yaitu proporsi komisaris independen dan ukuran dewan komisaris sebagai mekanisme *good corporate governance*. Pemilihan proporsi komisaris independen sebagai salah satu variabel yang menentukan tingkat konservatisme dalam perusahaan dikarenakan adanya salah satu tugas dari komisaris independen yaitu menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, sehingga semakin banyak komisaris independen didalam suatu perusahaan maka diyakini bahwa semakin kecil tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Alasan pemilihan ukuran dewan komisaris sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi tingkat konservatisme dalam perusahaan adalah dikarenakan semakin besar ukuran dewan komisaris perusahaan maka semakin besar pula kekuatan dalam dewan komisaris dalam melakukan pengawasan sehingga penggunaan akuntansi yang konservatif akan semakin tinggi pula (Brilianti, 2013).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adanya *research gap* yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu dan dengan adanya perkembangan mengenai proses implementasi IFRS di Indonesia maka penulis merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian kembali dengan periode pengamatan 2014-2016 dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi Praktik Konservatisme Akuntansi Setelah Implementasi IFRS”**.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengujian pengaruh *Bonus Plan*, *Political Cost*, *Debt Covenant*, serta proporsi komisaris independen dan ukuran dewan komisaris sebagai mekanisme *good corporate governance* terhadap eksistensi praktik konservatisme akuntansi setelah Implementasi IFRS. Dalam penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2014-2016.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Bonus Plan* Berpengaruh Terhadap Eksistensi Praktik Konservatisme Akuntansi ?
2. Apakah *Political Cost* Berpengaruh Terhadap Eksistensi Praktik Konservatisme Akuntansi ?
3. Apakah *Debt Covenant* Berpengaruh Terhadap Eksistensi Praktik Konservatisme Akuntansi ?
4. Apakah Proporsi Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Eksistensi Praktik Konservatisme Akuntansi ?
5. Apakah Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Eksistensi Praktik Konservatisme Akuntansi ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Bonus Plan*, *Political Cost*, *Debt Covenant* serta Proporsi Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Komisaris sebagai mekanisme *good corporate governance* terhadap eksistensi praktik konservatisme akuntansi setelah implementasi IFRS.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Kontribusi Praktis

Bagi para investor, baik investor potensial atau analis, hasil penelitian ini dapat memberi masukan memberikan informasi mengenai tingkat konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan dan pengaruh penerapan *Bonus Plan*, *Political Cost*, *Debt Covenant* serta Proporsi Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Komisaris sebagai mekanisme *good corporate governance* terhadap eksistensi praktik konservatisme akuntansi setelah implementasi IFRS.

1.4.2.2 Kontribusi Teoritis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menambah study literatur dan menambah wawasan serta menjadi sumber acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konservatisme akuntansi.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini tercantum latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis/peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dalam hipotesa (bila diperlukan).

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dalam ketajaman daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahasnya, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II. Mahasiswa diharapkan dapat mengemukakan suatu gagasan/rancangan/model/alat /teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V Simpulan dan Saran

Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan, yang sekurang-kurangnya tersiri dari; (1) jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis; (2) hal baru yang ditemukan dalam prospek temuan; (3) pemakanaan teoritik dari hal baru yang ditemukan. Saran merupakan implikkasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi perusahaan (objek penelitian) dan penelitian selanjutnya, sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Lampiran